



LAPORAN

PENGELOLAAN RISIKO

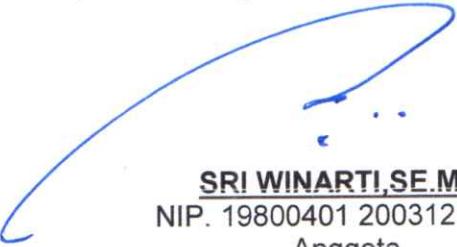
TRIWULAN I TAHUN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN**



NO DOKUMEN : 710/271.1 /413.111/2025

TANGGAL : 29 April 2025

Disiapkan Oleh	: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi  SRI WINARTI, SE, MM. NIP. 19800401 200312 2 006 Anggota
Diperiksa	: Sekretaris  Ir.YAYUK SRI RAHAYU,ST.MT. NIP. 19690428 200112 2 003 Koordinator
Disahkan Oleh	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan  Drs. HAMDANI AZAHARI, MM. NIP. 19651021 198602 1 003 Ketua

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko Organisasi. Termasuk adanya kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, dan penilaian hal-hal negatif yang dapat terjadi. Penerapan manajemen Resiko berpijak pada konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi manajemen. Proses atau fungsi manajemen resiko sering diterjemahkan dalam tiga langkah yaitu perencanaan ,pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen resiko diharapkan membuat organisasi menjadi sadar resiko dan lebih berhati - hati dalam pengambilan keputusan. Hasil yang diharapkan adalah keputusan yang tepat dan optimal bagi organisasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (i) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko. Maka Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/KEP/413.013/2024 tentang Struktur pengelolaan risiko Kabupaten Lamongan maka Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilaksanakan manajemen Risiko untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan daerah kreatif berwawasan budaya dan keseimbangan menuju keharmonisan sesuai visi Terwujudnya kejayaan Lamongan yang berkeadilan.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
6. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/KEP/413.013/2024 tentang Struktur pengelolaan risiko Kabupaten Lamongan

C. Maksud dan Tujuan

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

1.4 Ruang Lingkup

Manajemen risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- a. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- b. Identifikasi risiko ;
- c. Analisis risiko ;
- d. Evaluasi risiko ;
- e. Pengendalian risiko ;
- f. Pemantauan dan telaah ulang ;
- g. Koordinasi dan komunikasi.

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tribulan I

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun kegiatan- kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada tribulan I sebagaimana terlampir.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan I

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan - kegiatan pengendalian terhadap risiko – risiko yang dilaksanakan pada Tribulan I sebagaimana terlampir

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko antara lain Keterbatasan kapasitas ASN pengelola managemen risiko sehingga menjadi penghambat dalam merumuskan rencana tindak pengendalian terhadap risiko yang ada

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum perlu dilakukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya,dari hasil capaian kinerja yang sudah terealisasi menandakan bahwa risiko sudah dapat di minimalisir dan sisa risiko dapat diselesaikan pada tribulan I. Sehingga Rencana tindak pengendalian yang sudah ada untuk terus dilaksanakan sesuai dengan jadwal rencana yang sudah di tentukan sampai dengan akhir tahun.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat simpulan bahwa sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai upaya perbaikan.selain itu peranan unit pengendali risiko sangat penting dalam pengelolaan risiko di mulai dari identifikasi risiko,pelaksanaan kegiatan,penyusunan rencana tindak pengendalian dan pemantauan.sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja kami akan melakukan evaluasi dan review terhadap rencana tindak pengendalian secara terpadu serta peningkatan kapasitas SDM pengelola Risiko.

LAMPIRAN

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

<p>Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan</p> <p>Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Lamongan</p> <p>Tahun Penilaian : 2025</p> <p>Periode yang dinilai : 2025</p> <p>Tujuan Strategis : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan</p> <p>Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Efektivitas Investasi dan Meningkatnya Pelayanan Perizinan</p> <p>Urusan Pemerintahan : Penanaman Modal</p> <p>OPD yang Dinilai : Pemerintah Kabupaten Lamongan</p>											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			C/ U/ C	Dampak Uraian
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
	PENANAMAN MODAL										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai	ROO.19.03.36.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya koordinasi dengan Bappelitbangda	Internal	C	Perencanaan kurang tepat	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan Evaluasi perangkat daerah kurang tepat	ROO.19.03.36.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya koordinasi dengan Bappelitbangda	Internal	C	Perencanaan kurang tepat	

					Pintu					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Jaminan	Pertanggung jawaban	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	Internal	C	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pelaporan	Risiko Operasional Kegiatan koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	Internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pelaporan	Risiko Operasional Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	Internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Kegiatan	Pertanggung jawaban	Risiko Operasional Kegiatan 4 Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya tidak sesuai	ROO.19.03.02.5.2	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya disiplin Pegawai	Internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Kegiatan	Pertanggung jawaban	Risiko Operasional Kegiatan Laporan pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan	ROO.19.03.5.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Kurangnya peningkatan kualitas SDM	Internal	C	pelaksanaan tidak sesuai dengan bidangnya

				fungsi tidak sesuai	Pintu					
	Administrasian Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyediaan peralatan rumah tangga tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyediaan bahan logistik kantor tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyediaan barang cetakan dan penggandaan tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terpenuhi bahan bacaan	Internal	C	penyediaan bahan bacaan kurang tepat

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan fasilitasi kunjungan tamu tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terjamin fasilitas tamu	Internal	C	penyediaan makan minum tamu kurang tepat
	Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pertanggung jawaban	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tidak tepat waktu	ROO.19.03.5.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya peningkatan kualitas SDM	Internal	C	pelaksanaan tidak sesuai dengan bidangnya
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Pengadaan Meubel	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan pengadaan Meubel tidak sesuai	ROO.19.03.5.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan pengadaan peralatan dan mesin lainnya tidak tepat waktu	ROO.19.03.5.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya Jasa	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyedia jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik tidak tepat waktu	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi jasa komunikasi, SDA dan listrik	Internal	C	penyediaan jasa kurang tepat

	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor kurang tepat	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi jasa sarana prasarana	Internal	C	penyediaan jasa kurang tepat
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya Jasa	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyedia jasa pelayanan Umum Kantor kurang tepat	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya peningkatan kualitas SDM	Internal	C	penyediaan jasa pelayanan kurang tepat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Operasional Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan tidak sesuai	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terpeliharanya sarana prasarana	Internal	C	penyediaan jasa kurang tepat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Operasional Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, Pajak dan perizinan kenararaan dinas Operasional atau lapangan tidak sesuai	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terpeliharanya sarana prasarana	Internal	C	penyediaan jasa kurang tepat
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Operasional Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin tidak tepat waktu	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terpeliharanya sarana prasarana	Internal	C	penyediaan jasa kurang tepat

	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Operasional Kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi tidak sesuai	ROO.19.03.1.13	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Kelola Penanaman Modal	Kurang sesuai pelaksanaan kegiatan promosi	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan promosi kurang tepat
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									
	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha berbasis resiko Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Pemangku Kepentingan data perizinan per sektor setiap kecamatan belum	ROO.19.03.1.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Perizinan	kurang koordinasi dengan dinas terkait (tim teknis)	Eksternal	U C	sistem digital kurang memadai
	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Pemangku Kepentingan layanan dan pengelolaan konsultasi perizinan berbasis resiko belum	ROO.19.03.1.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Perizinan	kurang tersedianya sarana layanan konsultasi dan pengaduan	Eksternal	U C	Rendahnya kepuasan Masyarakat

	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Pemangku Kepentingan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan perizinan berusaha berbasis resiko belum	ROO.19.03.1.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Perizinan	kurang koordinasi dengan dinas terkait (tim teknis)	Eksternal	U C	Pelayanan kurang cepat
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota									
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan kegiatan usahanya	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Pemangku Kepentingan Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya belum	ROO.19.03.1.13	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Kelola Penanaman Modal	kurang koordinasi dengan pelaku usaha	Eksternal	U C	Rendahnya kepuasan Masyarakat
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Pemangku Kepentingan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha belum	ROO.19.03.1.13	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Kelola Penanaman Modal	kurang ilmu pengetahuan pada pelaku usaha	Eksternal	U C	Rendahnya kepuasan Masyarakat

	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Pemangku Kepentingan Pengawasan penanaman modal belum	ROO.19.03.1.13	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Kelola Penanaman Modal	kurang koordinasi dengan pelaku usaha	Eksternal	U C	Rendahnya kepuasan Masyarakat	Dinas kepada Masyarakat
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL										
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Operasional Kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan Informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem elektronik belum	ROO.19.03.1.13	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Kelola Penanaman Modal	kurang optimalnya pengelolaan data secara elektronik	Internal	C	penyajian data tidak tepat	DPMPTSP



**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Lamongan
Tahun Fenilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2025
Tujuan Strategis	: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penanaman Modal
OPD yang Dinilai	: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Lamongan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terk	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
A	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	Prosentase pertumbuhan ekonomi	Pengembangan Potensi Investasi Kurang Optimal	RSO.19.02.01.18	Bupati Lamongan	Kurangnya promosi investasi yang berdampak pada menurunnya minat investasi	Eksternal	UC	Prosentase pertumbuhan ekonomi rendah	Bupati Lamong	
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMDN	Menurunnya Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMDN	RSO.19.02.01.18		Pajak Daerah yang Tinggi	Eksternal	UC	Prosentase Nilai Realisasi Investasi Rendah	Invest	
		Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMA	Menurunnya Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMA	RSO.19.02.01.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Regulasi dipandang masih rumit	Eksternal	UC	Prosentase Nilai Realisasi Investasi Rendah	Invest	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	Menurunnya Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	RSO.19.02.01.18	Penata perizinan	Alur koordinasi yang terlalu panjang dari DPMPTSP ke perangkat daerah lain	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pem pener layan	

	Program pengembangan iklim penanaman modal	Presentase peningkatan minat investasi	Menurunnya jumlah investor FMA dan PMDN	RSO.19.02.01.18	Penata kelola Penanaman modal	Kurangnya informasi potensi investasi di Kabupaten Lamongan	Eksternal	UC	Presentase minat investasi rendah	Investor
	Program Promosi Penanaman Modal	Presentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Menurunnya kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	RSO.19.02.01.18	Penata kelola Penanaman modal	Anggaran yang tidak tersedia tidak sesuai ketentuan	Eksternal	UC	Menurunnya minat investasi karena informasi potensi investasi di Kabupaten Lamongan kurang dipromosikan	Investor
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Presentase pengendalian perusahaan yang berinvestasi	Menurunnya perusahaan yang melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	RSO.19.02.01.18	Penata kelola Penanaman modal	Kurang pahamnya perusahaan akan kewajibar penyampaian LKPM	Eksternal	UC	Pengendalian dan pengawasan perusahaan menjadi terhambat	Perusa Pelaku usaha
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Nilai IKM/SKM	Menurunnya Nilai IKM/SKM akibat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tidak dapat dilaksanakan dengan prima	RSO.19.02.01.18	Penata perizinan	SDM pelayanan yang belum optimal	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pemoh penerima layanan
		Nilai SAKIP DPMPTSP	Menurunnya Nilai SAKIP DPMPTSP	RSO.19.02.04.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Kurangnya inovasi/perbaikan terkait manajemen kinerja	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah dan efektivitas pelayanan rendah	Pemoh penerima layanan

